

PENGELOLAAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Pengelolaan keuangan sektor publik menjadi hal yang sangat vital bagi kelangsungan dan kemajuan suatu negara. Dalam konteks ini, sektor publik meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga dan badan yang berkaitan dengan urusan publik. Artikel ini akan mengulas tentang pentingnya pengelolaan keuangan sektor publik serta peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan keuangan sektor publik memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. APBN menjadi instrumen utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang mencakup alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan APBN menjadi kunci untuk memastikan bahwa sumber daya publik dimanfaatkan secara efisien dan efektif.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy



PENGELOLAAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

M. Zahari, Paul Usmany, Andi Asari, La Didi



PENGELOLAAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

M. Zahari, Paul Usmany, Andi Asari, La Didi



**PENGELOLAAN
KEUANGAN
SEKTOR PUBLIK**

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGELOLAAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

M. Zahari, Paul Usmany, Andi Asari, La Didi



PENGELOLAAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Penulis:

M. Zahari, Paul Usmany, Andi Asari, La Didi

Editor:

Andi Asari

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

viii, 112 hlm, 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8606-88-7

Cetakan Pertama:

April 2024

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

Prakata

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul **Pengelolaan Keuangan Sektor Publik**. Buku ini disusun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Konsep dasar Keuangan Sektor Publik, Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Publik, Pengeluaran Negara, Dasar Penerimaan Negara, Pengaruh Pajak terhadap Perekonomian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Utang Negara, Kebijakan Keuangan Negara.

Kami menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis, 4 April 2024

Daftar Isi

Prakata	v
Pendahuluan	1

BAB 01· Konsep Dasar Keuangan Sektor Publik

A. Pengenalan Keuangan Sektor Publik.....	3
B. Pendapatan dan Belanja Publik	7
C. Manajemen Utang Publik.....	9
D. Akuntansi Sektor Publik.....	11
E. Evaluasi Kinerja dan Penganggaran Kinerja.....	12

BAB 02· Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Publik

A. Prinsip Transparansi.....	15
B. Prinsip Akuntabilitas.....	16
C. Prinsip Efisiensi	18
D. Prinsip Efektivitas	19
E. Prinsip Keterjangkauan (<i>Affordability</i>).....	20
F. Prinsip Kepatuhan Hukum.....	21
G. Prinsip Ketidakberpihakan (<i>Impartiality</i>).....	22
H. Keberlanjutan (<i>Sustainability</i>).....	23

BAB 03· Pengeluaran Negara

A. Konsep Pengeluaran Negara	25
B. Tujuan Pengeluaran Negara	26
C. Sumber Pendanaan Pengeluaran Negara.....	28
D. Struktur Pengeluaran Negara	31

E. Proses Pengeluaran Negara.....	32
F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pengeluaran Negara.....	34

BAB 04. Dasar Penerimaan Negara

A. Pendapatan Negara	37
B. Penerimaan Perpajakan	38
C. Penerimaan Bukan Pajak (PNBP).....	40

BAB 05. Pengaruh Pajak terhadap Perekonomian

A. Dasar Teori Pajak dan Fungsinya dalam Ekonomi.....	49
B. Pengaruh Pajak terhadap Penawaran dan Permintaan	51
C. Pajak dan Pengeluaran Pemerintah	57

BAB 06. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

A. Pengertian APBN	59
B. Fungsi APBN.....	60
C. Tujuan APBN	61
D. Komponen APBN	63
E. Proses Penyusunan APBN	65
F. Tantangan dalam Pengelolaan APBN.....	66
G. Pengawasan dan Akuntabilitas APBN	68

BAB 07. Utang Negara

A. Definisi Utang Negara.....	71
B. Macam-Macam Utang Negara	72
C. Sumber Pinjaman Negara	76
D. Masalah Utang Negara	77
E. Solusi Mengatasi Utang.....	79
F. Beban Utang Negara.....	80

BAB 08. Kebijakan Keuangan Negara

A. Keuangan Negara.....	83
B. Kebijakan Keuangan Negara	85
C. Instrumen Kebijakan Keuangan Negara.....	86
D. Proses Pembuatan Kebijakan Keuangan Negara.....	87
E. Peran Berbagai Pihak dalam Kebijakan.....	90
F. Evaluasi Kebijakan Keuangan Negara.....	91
G. Tantangan dalam Kebijakan Keuangan Negara	93
Kesimpulan	97
Daftar Pustaka	99
Tentang Penulis	107

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan sektor publik menjadi hal yang sangat vital bagi kelangsungan dan kemajuan suatu negara. Dalam konteks ini, sektor publik meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga dan badan yang berkaitan dengan urusan publik. Artikel ini akan mengulas tentang pentingnya pengelolaan keuangan sektor publik serta peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan keuangan sektor publik memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. APBN menjadi instrumen utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang mencakup alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan APBN menjadi kunci untuk memastikan bahwa sumber daya publik dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan APBN adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk pengelolaan APBN. Dengan melakukan audit secara independen, BPK memastikan bahwa penggunaan dana publik telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Melalui pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh, BPK juga membantu

dalam mengidentifikasi potensi penyalahgunaan dan pemborosan dana publik, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi yang diperiksa.

BAB 1

Konsep Dasar Keuangan Sektor Publik

A. Pengenalan Keuangan Sektor Publik

Pendanaan/keuangan sektor publik biasanya diatur oleh kebijakan dan peraturan pemerintah, dan sering kali menjadi subjek pengawasan dan pengawasan publik. Istilah "keuangan sektor publik" mengacu pada manajemen keuangan dan operasi entitas dan organisasi pemerintah, termasuk penganggaran, pengumpulan pendapatan, dan pengeluaran untuk layanan publik dan infrastruktur (Wojewski, 2020).

Keuangan sektor publik mencakup berbagai bagian dari pengelolaan dan operasional keuangan berbagai entitas dan lembaga pemerintah. Beberapa bidang utama dalam lingkup ini meliputi (Ball *et al.*, 2002; Malyshko, 2021):

1. Anggaran: Proses membuat dan mengelola anggaran pemerintah, yang mencakup menetapkan tujuan pendapatan dan pengeluaran, mengatur alokasi sumber daya, dan melacak kinerja keuangan.
2. Pengumpulan Pendapatan: Proses pengumpulan pajak, retribusi, dan sumber pendapatan pemerintah lainnya. Ini mencakup administrasi pajak, kebijakan pajak, dan pemungutan penerimaan negara bukan pajak.

3. Pengelolaan Utang Publik: Proses penerbitan dan pengelolaan utang pemerintah, termasuk manajemen surat utang publik, pembayaran utang, dan analisis keberlanjutan utang.
4. Kemitraan Publik-Swasta (KPS) dan Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI): Danai dan pengelolaan proyek sektor publik seperti infrastruktur dan layanan publik dengan menggunakan pendanaan dan keahlian sektor swasta.
5. Regulasi dan Pengawasan Keuangan: Pembentukan dan pelaksanaan protokol, kebijakan, dan standar untuk memastikan bahwa keuangan sektor publik transparan, akuntabel, dan efektif.
6. Pelaporan dan Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik: Persiapan dan distribusi laporan keuangan serta sistem pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan pengelolaan dana publik yang efektif dan efisien.
7. Kebijakan Fiskal: Penggunaan belanja pemerintah, perpajakan, dan langkah-langkah fiskal lainnya untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi dan mencapai tujuan kebijakan seperti meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi masalah sosial.
8. Inovasi Sektor Publik: Pengembangan dan penerapan solusi inovatif di sektor publik, termasuk pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D) dan dukungan terhadap inovasi sektor publik di berbagai sektor ekonomi.
9. Kerjasama Internasional dan Bantuan Pembangunan: Peran keuangan sektor publik dalam membantu pembangunan dan bekerja sama dengan negara lain dalam hal keuangan dan ekonomi, seperti lembaga keuangan internasional dan tata kelola keuangan global.
10. Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik: Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi keuangan sektor publik, termasuk penerapan praktik terbaik, penggunaan teknologi baru, dan penguatan kerangka kelembagaan.

Bisnis keuangan sektor publik memiliki banyak aspek dan berbagai tujuan (Erude *et al.*, 2023; Gabow, 2017; Wibowo, 2019):

1. Mendorong Efektivitas Program Pembangunan: Audit sektor publik sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan berjalan dengan baik dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun, banyak program pembangunan yang tidak mencapai tujuannya, menunjukkan bahwa pendekatan audit sektor publik saat ini mungkin tidak cukup untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan.
2. Menambah Nilai dan Membantu Organisasi: Sebagai bagian dari keuangan sektor publik, audit internal diharapkan dapat meningkatkan nilai dan membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya. Meskipun telah digunakan secara resmi di sektor publik Afrika Selatan, hal ini belum berhasil mencapai hasil yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja sektor publik dan meningkatkan kualitas layanan.
3. Meningkatkan Efisiensi Operasional: Unit-unit di sektor keuangan publik menggunakan pengendalian manajemen, yang mencakup audit internal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tujuan dan tugas dilaksanakan secara sah, efisien, ekonomis, dan tepat waktu. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan peningkatan efisiensi operasional perusahaan.
4. Mendorong Pembangunan Sektor Informal: Pendanaan sektor publik dapat membantu sektor informal, yang dapat menjadi sumber penting dari kegiatan ekonomi dan lapangan kerja. Namun, hal ini mungkin memerlukan perubahan kebijakan dan dukungan pemerintah yang lebih besar untuk sektor ini.
5. Meningkatkan Kinerja Organisasi: Kinerja organisasi di sektor publik dapat sangat dipengaruhi oleh praktik manajemen strategis, yang merupakan bagian dari keuangan sektor publik. Praktik-praktik ini termasuk manajemen mutu strategis, kepemimpinan strategis, perencanaan strategis, dan inovasi strategis.

Ringkasnya, tujuan keuangan sektor publik adalah untuk meningkatkan efisiensi program pembangunan, meningkatkan nilai dan bantuan perusahaan, mendorong pertumbuhan sektor informal, dan meningkatkan kinerja.

Untuk menjamin pengelolaan keuangan sektor publik yang efektif dan efisien, prinsip-prinsip utama harus diterapkan (Gusarova, 2021):

1. **Transparansi:** Untuk menjamin akuntabilitas dan kepercayaan dalam pengelolaan dana publik, transaksi keuangan harus transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Akuntabilitas:** Sistem pengelolaan keuangan harus dibuat sehingga pejabat publik dapat bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik.
3. **Efisiensi:** Manajemen keuangan sektor publik harus memastikan bahwa sumber daya dialokasikan untuk program dan layanan yang paling efisien dan efektif serta mengurangi pemborosan.
4. **Efektivitas:** Perencanaan sistem pengelolaan keuangan harus memastikan bahwa dana publik digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan bahwa program dan layanan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. **Integritas:** Sistem pengelolaan keuangan harus dibuat untuk menghindari dan menemukan penipuan, korupsi, dan kesalahan pengelolaan dana publik lainnya.
6. **Kepatuhan:** Peraturan, peraturan, dan kebijakan yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan pelaporan dan akuntabilitas keuangan, harus dipatuhi oleh manajemen keuangan sektor publik.
7. **Manajemen Risiko:** Prinsip-prinsip manajemen risiko harus termasuk dalam manajemen keuangan sektor publik saat mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, dan membuat rencana untuk memitigasinya.
8. **Perbaikan Berkelanjutan:** Manajemen keuangan sektor publik harus terus berkembang dengan menggabungkan praktik terbaik dan menyesuaikan diri dengan perubahan.

Untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan negara secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini sangat penting.

B. Pendapatan dan Belanja Publik

Pendapatan nasional secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam kategori berikut (Martinez, 2019; Nicolaus Tideman & Plassmann, 2015):

1. Pajak: Pajak adalah sumber pendapatan publik yang paling umum. Pajak terdiri dari berbagai jenis, seperti pajak penghasilan, pajak properti, pajak penjualan, dan pajak warisan, dan dikenakan pada individu dan perusahaan untuk membayar untuk layanan publik dan infrastruktur.
2. Penanaman Bukan Pajak: Sumber-sumber seperti retribusi, denda, dan royalti dari penjualan sumber daya alam termasuk dalam penerimaan bukan pajak. Sumber-sumber ini lebih mudah dikelola dan lebih akuntabel daripada pajak karena sering kali terkait langsung dengan layanan atau kegiatan tertentu.
3. Hibah dan Bantuan: Organisasi swasta dan pemerintah federal, negara bagian, dan lokal dapat memberikan hibah dan bantuan kepada badan publik untuk program atau proyek tertentu.
4. Biaya Pengguna: Biaya yang dibayarkan oleh individu atau organisasi untuk mendapatkan akses ke layanan atau fasilitas publik disebut biaya pengguna. Biaya-biaya ini dapat membantu mengimbangi biaya penyediaan layanan dan mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efektif.
5. Penjualan Aset Publik: Dengan menjual aset publik seperti bangunan dan tanah kepada entitas swasta, pemerintah dapat menghasilkan pendapatan, yang dapat mengurangi beban pajak pemerintah dan memberikan sumber pendapatan untuk proyek atau inisiatif tertentu.
6. Pinjaman: Pemerintah juga dapat memperoleh pendapatan dengan meminjam dana dari lembaga keuangan atau sumber lain. Ini dapat membantu mendanai proyek atau inisiatif besar,

tetapi juga dapat meningkatkan utang pemerintah secara keseluruhan.

Singkatnya, pengelolaan keuangan sektor publik bergantung pada berbagai sumber pendapatan, seperti pajak, pendapatan bukan pajak, hibah dan bantuan, retribusi, penjualan aset publik, dan pinjaman. Sumber-sumber ini dapat digunakan untuk mendanai layanan publik, infrastruktur, dan inisiatif lainnya, dan dapat dikelola dengan cara yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Salah satu elemen penting dalam manajemen keuangan sektor publik adalah proses pengalihan anggaran publik, yang mencakup langkah-langkah berikut (Akhorshaideh & Alshoubaki, 2019):

1. **Persiapan Proposal Anggaran Nasional:** Fase ini melibatkan lembaga eksekutif pemerintah membuat proposal anggaran yang menjelaskan pengeluaran untuk tahun fiskal mendatang. Proposal ini biasanya disusun berdasarkan prioritas kebijakan pemerintah dan diserahkan ke legislatif untuk ditinjau dan disetujui.
2. **Penggunaan Anggaran Nasional:** Usulan anggaran dievaluasi oleh badan legislatif, yang memiliki otoritas untuk melakukan perubahan atau penyesuaian sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Anggaran menjadi dasar pengeluaran tahun fiskal tersebut setelah diadopsi.
3. **Eksekusi Anggaran Nasional:** Fase ini melibatkan pelaksanaan anggaran, yang menetapkan dana untuk berbagai program dan layanan. Cabang eksekutif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran dilaksanakan dengan benar dan dana digunakan secara efisien.
4. **Evaluasi dan Audit:** Tahap terakhir melibatkan evaluasi dan audit anggaran untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan baik dan efektif. Ini mencakup memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan anggaran yang disetujui dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses alokasi anggaran publik harus transparan, akuntabel, dan efisien, dengan fokus pada memastikan bahwa dana publik digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan dan bahwa program serta layanan efektif dalam memenuhi kebutuhan publik. Hal ini memerlukan sistem *checks and balances* yang kuat, dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang tepat.

C. Manajemen Utang Publik

Utang publik dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, termasuk (Ekperiware *et al.*, 2022; Tsvirko, 2023):

1. Utang Dalam Negeri: Ini adalah utang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mata uang negara, dan dapat dibagi lagi menjadi utang jangka pendek dan jangka panjang, tergantung pada jatuh tempo instrumen utang.
2. Utang Luar Negeri: Ini adalah utang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mata uang asing. Utang luar negeri dapat dibagi menjadi utang jangka pendek dan jangka panjang, dan juga dapat dibagi lagi menjadi utang yang dikeluarkan oleh sektor swasta dan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah.
3. Biaya Pembayaran Utang: Ini mengacu pada biaya yang terkait dengan pembayaran utang publik, termasuk pembayaran pokok dan pembayaran bunga. Biaya pembayaran utang dapat menjadi beban yang signifikan terhadap anggaran pemerintah, terutama dalam kasus utang pemerintah yang tinggi.
4. Kewajiban Kontinjensi: Ini adalah kewajiban yang telah ditanggung pemerintah tetapi belum diakui secara hukum sebagai utang. Ini dapat mencakup jaminan, komitmen, dan kewajiban lain yang dapat menghasilkan utang atau tidak.
5. Hutang di Luar Neraca: Ini adalah hutang pemerintah yang tidak tercatat di neraca tetapi tetap merupakan kewajiban keuangan. Ini dapat termasuk utang yang dijamin pemerintah, utang badan usaha milik negara, atau jenis utang lain yang tidak diakui secara formal sebagai utang publik.
6. Utang Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS): KPS adalah utang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam konteks kemitraan

publik-swasta. Bidang ini sangat kompleks dan terus berkembang karena melibatkan pelaku sektor publik dan swasta dan memiliki fitur dan risiko yang berbeda.

Jenis klasifikasi utang publik berbeda-beda tergantung pada situasi dan kebutuhan pemerintah tertentu. Namun, untuk mengelola utang publik dengan baik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis utang, serta risiko dan kesulitan yang terkait dengan masing-masing jenis utang.

Salah satu komponen penting dalam manajemen keuangan sektor publik adalah manajemen risiko utang publik. Manajemen risiko yang efektif dapat membantu mencegah masalah yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa utang publik dikelola secara berkelanjutan dan efisien. Beberapa masalah utama yang terkait dengan utang publik termasuk (Fisnik & Berisha, 2021):

1. Risiko Kedaulatan (*Sovereign Risk*): Risiko ini mengacu pada kemungkinan bahwa suatu negara gagal memenuhi kewajiban utangnya karena ketidakstabilan keuangan atau politik. Kondisi perekonomian, stabilitas politik, dan kemampuan pemerintah untuk mengelola keuangannya adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi risiko kedaulatan.
2. Risiko Suku Bunga: Ini mengacu pada kemungkinan bahwa nilai utang pemerintah akan dipengaruhi oleh perubahan suku bunga. Jika suku bunga naik, nilai utang yang ada dengan suku bunga lebih rendah mungkin menurun, yang berarti biaya pembayaran utang akan meningkat.
3. Risiko Mata Uang: Ini mengacu pada risiko bahwa nilai utang pemerintah akan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Jika nilai mata uang menurun, biaya pembayaran utang dalam mata uang tersebut dapat meningkat.
4. Risiko Likuiditas: Risiko ini mengacu pada kemungkinan bahwa pemerintah tidak dapat mengumpulkan dana di pasar saat diperlukan. Kondisi pasar, kredibilitas kredit pemerintah, dan ketersediaan sumber pendanaan alternatif dapat memengaruhi risiko likuiditas.

5. Risiko Operasional: Ini mencakup penipuan, kesalahan, dan jenis salah urus lainnya. Ini dapat terjadi karena peristiwa eksternal atau karena proses internal, orang, atau sistem yang tidak memadai atau gagal.

Manajemen risiko utang pemerintah yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ancaman dan risiko serta rencana yang tepat untuk memitigasinya. Untuk mengurangi risiko operasional, hal ini dapat mencakup diversifikasi sumber utang, menjaga cadangan yang memadai, dan menerapkan pengendalian internal yang kuat. Selain itu, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang publik dapat membangun kepercayaan dan keyakinan terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola keuangannya dengan baik.

D. Akuntansi Sektor Publik

Untuk memastikan keakuratan, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan sektor publik, prinsip dasar akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut (Bîrlă *et al.*, 2023; Maksimović *et al.*, 2020; Rahmani *et al.*, 2023):

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan: Akuntansi sektor publik harus mematuhi undang-undang, peraturan, dan standar akuntansi yang relevan.
2. Transparansi: Laporan keuangan harus terbuka dan memberikan informasi keuangan yang jelas dan akurat kepada masyarakat umum.
3. Akuntabilitas: Akuntansi sektor publik harus memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan laporan yang jelas tentang bagaimana dana tersebut dialokasikan dan digunakan.
4. Integritas: Pelaporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan serta standar integritas tertinggi harus diterapkan dalam akuntansi sektor publik.
5. Manajemen Risiko: Prinsip-prinsip manajemen risiko harus diterapkan dalam akuntansi sektor publik untuk meng-

identifikasi risiko yang mungkin terjadi, dan merencanakan cara untuk mengurangnya.

6. Perbaikan Berkelanjutan: Akuntansi sektor publik harus terus berkembang dengan menggabungkan praktik terbaik dan menyesuaikan diri dengan perubahan.

Akuntansi sektor publik yang baik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini serta pengembangan sistem dan prosedur yang tepat untuk memastikan penerapannya. Hal ini dapat mencakup penggunaan konsep manajemen modern, seperti sistem manajemen terintegrasi, untuk mendorong pengelolaan dan pengendalian keuangan yang efektif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas akuntansi sektor publik dapat membangun kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk mengatur keuangan dengan baik.

E. Evaluasi Kinerja dan Penganggaran Kinerja

Penganggaran dan evaluasi kinerja adalah bagian penting dari pengelolaan keuangan sektor publik karena mereka memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Evaluasi kinerja mencakup penilaian kinerja entitas publik dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Evaluasi ini biasanya didasarkan pada indikator kinerja utama (KPI), yang mengukur seberapa efisien dan efektif program dan layanan publik. Selain itu, evaluasi ini memberikan wawasan berharga tentang cara sumber daya publik dapat digunakan dengan lebih baik di masa depan.

Sebaliknya, penganggaran kinerja adalah metode penganggaran yang menghubungkan alokasi anggaran dengan hasil kinerja. Ini dimaksudkan untuk mendorong entitas publik untuk memprioritaskan pencapaian hasil tertentu dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai. Ini dapat membantu memastikan bahwa dana publik digunakan dengan cara yang lebih efisien dan efektif.

Untuk melakukan evaluasi dan penganggaran kinerja yang berhasil, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang aturan akuntansi sektor publik, serta kemampuan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan melaporkan informasi kinerja secara terbuka dan akuntabel. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sektor publik dapat membangun kepercayaan dan keyakinan bahwa pemerintah dapat mengelola keuangannya dengan baik.

BAB 2

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Publik

A. Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan keterbacaan informasi keuangan publik, yang memungkinkan warga negara untuk memahami dan mengawasi bagaimana pemerintah menggunakan dana yang diperoleh dari pajak dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Dengan adanya transparansi yang baik, setiap individu memiliki akses yang sama terhadap informasi keuangan publik, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penggunaan dana publik tersebut.

Transparansi mencakup beberapa aspek. Pertama, informasi keuangan haruslah tersedia secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini berarti bahwa laporan keuangan pemerintah, anggaran belanja, rencana pembangunan, dan informasi keuangan lainnya harus dipublikasikan secara teratur dan diperbaharui secara berkala. Selain itu, informasi tersebut haruslah disajikan secara jelas dan mudah dimengerti, sehingga memungkinkan warga negara dari berbagai latar belakang untuk memahaminya tanpa kesulitan (Hepworth, 2023).

Kedua, transparansi juga mencakup pengungkapan informasi yang lengkap dan akurat. Pemerintah harus memberikan gambaran yang jujur dan menyeluruh tentang pengelolaan keuangan publiknya, termasuk pengungkapan atas pendapatan yang diperoleh, belanja yang dilakukan, utang yang dimiliki, dan kinerja keuangan secara umum. Pengungkapan yang lengkap dan akurat memungkinkan masyarakat untuk memahami secara menyeluruh kondisi keuangan negara serta membuat evaluasi yang tepat terhadap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Selain itu, transparansi juga melibatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pengawalan terhadap pengelolaan keuangan publik. Pemerintah harus mendorong partisipasi publik dalam pembuatan keputusan keuangan, baik melalui mekanisme konsultasi publik, pertemuan terbuka, atau lembaga-lembaga pengawas independen. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, transparansi bukan hanya menjadi alat untuk memonitor penggunaan dana publik, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat akuntabilitas dan legitimasi pemerintah.

B. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik adalah aspek kunci dalam memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik yang dipercayakan kepadanya. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan keuangannya kepada warga negara, lembaga-lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip ini mendasarkan diri pada prinsip bahwa pemerintah beroperasi atas nama masyarakat, dan oleh karena itu, harus memastikan bahwa keputusan keuangan yang diambil berada dalam kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Aspek pertama dari prinsip akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyajikan informasi keuangan yang jelas, terbuka, dan terperinci. Hal ini mencakup penyusunan laporan keuangan yang akurat dan terperinci, termasuk pengungkapan pendapatan, belanja, dan posisi

keuangan secara menyeluruh. Laporan keuangan ini harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan harus dapat dipahami oleh semua pihak yang tertarik, termasuk masyarakat umum dan auditor independen.

Prinsip akuntabilitas menuntut adanya mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa pemerintah mematuhi standar keuangan yang berlaku dan menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Ini bisa mencakup audit internal yang ketat oleh unit-unit pengawasan internal pemerintah serta audit eksternal oleh badan audit independen atau lembaga audit pemerintah yang bertugas untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan dan regulasi keuangan. Selain itu, akuntabilitas juga mengharuskan pemerintah untuk menetapkan tujuan dan sasaran keuangan yang jelas, serta mengukur dan melaporkan kinerja keuangan mereka secara teratur. Dengan melakukan hal ini, pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan dana publik sejalan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat, dan bahwa hasil yang diharapkan dicapai dengan efektif.

Prinsip akuntabilitas juga mencakup kewajiban untuk menerima tanggung jawab atas kegagalan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus siap untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan keuangan yang buruk atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang baik. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas bukan hanya tentang memberikan laporan dan informasi, tetapi juga tentang mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki masalah dan memastikan perbaikan ke depannya.

Secara keseluruhan, prinsip akuntabilitas merupakan pondasi utama dalam pengelolaan keuangan publik yang bertanggung jawab dan efektif. Dengan memastikan bahwa pemerintah menyajikan informasi keuangan yang akurat, menjalankan fungsi pengawasan yang efektif, menetapkan tujuan yang jelas, dan menerima tanggung jawab atas tindakan mereka, prinsip ini membantu membangun kepercayaan masyarakat

dalam pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik secara keseluruhan (Calabrò, 2011).

C. Prinsip Efisiensi

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan aspek penting yang menekankan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Prinsip ini memastikan bahwa setiap dolar yang dihabiskan oleh pemerintah memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Efisiensi mengharuskan pemerintah untuk melakukan alokasi dana yang cermat, mengidentifikasi prioritas yang jelas, dan menghindari pemborosan serta praktik pengeluaran yang tidak efektif (Howard, 2001).

Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, efisiensi dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Pertama, pemerintah harus memprioritaskan penggunaan dana publik untuk program dan kegiatan yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Hal ini melibatkan analisis yang cermat tentang dampak dan efektivitas setiap program atau proyek yang didanai oleh anggaran publik. Selanjutnya, efisiensi juga melibatkan upaya untuk mengurangi biaya administratif dan operasional yang tidak perlu. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap struktur birokrasi dan proses kerja untuk mengidentifikasi area di mana penghematan dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas layanan yang disediakan kepada masyarakat.

Selain itu, efisiensi juga berhubungan dengan penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pemerintah untuk mengotomatisasi proses-proses yang repetitif dan mempercepat pengambilan keputusan, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan program-program publik. Tidak hanya itu, prinsip efisiensi juga membutuhkan manajemen yang baik terhadap aset-aset pemerintah, termasuk pengelolaan inventaris dan fasilitas dengan optimal serta memastikan bahwa

aset-aset tersebut digunakan secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pemerintah.

D. Prinsip Efektivitas

Efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip yang menekankan pada pencapaian hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Prinsip ini mengacu pada kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan dan program dengan efektif, baik dalam hal penyediaan layanan publik maupun pencapaian hasil yang diharapkan bagi masyarakat. Untuk mencapai efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik, pemerintah haruslah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk setiap program atau kegiatan yang didanai oleh dana publik. Tujuan ini harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu (SMART), sehingga memungkinkan untuk evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian hasil (Beschel *et al.*, 2012).

Selanjutnya, pemerintah juga harus mengalokasikan sumber daya secara proporsional dan strategis untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Ini melibatkan penentuan prioritas-prioritas yang tepat dalam penggunaan anggaran publik, serta alokasi dana yang cermat untuk program-program yang memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik juga menuntut pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja keuangan dan operasional dari setiap program atau kegiatan yang didanai oleh dana publik. Pemerintah harus mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk mengukur pencapaian hasil, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan membuat perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Selain itu, prinsip efektivitas juga melibatkan penggunaan data dan bukti empiris untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Pemerintah harus mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data secara aktif untuk memahami

tantangan dan peluang yang dihadapi, serta mengidentifikasi strategi terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dengan menerapkan prinsip efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Upaya untuk meningkatkan efektivitas tidak hanya membantu meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara bertanggung jawab dan efisien. Dengan demikian, prinsip efektivitas merupakan komponen kunci dalam pembangunan sistem keuangan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

E. Prinsip Keterjangkauan (*Affordability*)

Keterjangkauan (*affordability*) dalam pengelolaan keuangan publik mengacu pada kemampuan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan yang tersedia dan belanja yang direncanakan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan beban keuangan yang berlebihan. Prinsip ini menuntut agar keputusan pengeluaran dan pemungutan pajak dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat serta memastikan bahwa layanan publik yang esensial tetap tersedia dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat (Cnossen & Sinn, 2003).

Dalam konteks keterjangkauan, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, pentingnya memastikan bahwa kebijakan fiskal dan anggaran publik tidak menghasilkan beban pajak yang tidak terjangkau bagi warga negara. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan tarif pajak yang adil dan progresif, serta memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pajak yang diusulkan. Selanjutnya, keterjangkauan juga mencakup pengelolaan belanja publik dengan bijaksana. Pemerintah harus memprioritaskan alokasi dana untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang rentan atau berpendapatan rendah. Ini bisa mencakup layanan kesehatan, pendidikan, perumahan,

dan jaringan pengaman sosial lainnya yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa pengelolaan utang publik dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Utang publik yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan pembayaran bunga yang besar dan membebani anggaran negara di masa mendatang, sehingga mengancam keterjangkauan layanan publik. Pemerintah perlu memperhatikan batas-batas keterjangkauan dalam mengambil keputusan terkait peminjaman dan pengelolaan utang. Dengan menjaga keterjangkauan sebagai prinsip dalam pengelolaan keuangan publik, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan tekanan keuangan yang tidak perlu. Upaya untuk memastikan keterjangkauan tidak hanya penting untuk menjaga keseimbangan fiskal, tetapi juga untuk mempromosikan keadilan sosial dan kemakmuran yang berkelanjutan bagi semua warga negara.

F. Prinsip Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan publik yang menekankan pentingnya pemerintah untuk beroperasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa semua keputusan keuangan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan, undang-undang, dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan hukum dalam pengelolaan keuangan publik mencakup beberapa aspek. Pertama, pemerintah harus mematuhi semua aturan dan regulasi yang terkait dengan proses penganggaran, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Hal ini termasuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam pembuatan anggaran, mematuhi batasan-batasan yang diberlakukan terhadap pengeluaran, dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Selanjutnya, kepatuhan hukum juga mengharuskan pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan dan

pengendalian internal dengan baik. Ini termasuk menerapkan kontrol internal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan dana publik, mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan, dan mengambil tindakan korektif yang tepat jika terjadi pelanggaran terhadap hukum atau ketentuan lainnya. Selain itu, prinsip kepatuhan hukum juga melibatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah harus siap untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas setiap keputusan keuangan yang diambil, serta bersedia untuk menjalani proses audit dan pemeriksaan yang independen guna memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan mematuhi prinsip kepatuhan hukum dalam pengelolaan keuangan publik, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan yang diambil akan memiliki dasar yang kuat dalam hukum dan tidak akan melanggar hak-hak atau kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas dan legitimasi pemerintah, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara transparan, adil, dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan *good governance* (Hayek, 1978).

G. Prinsip Ketidakberpihakan (*Impartiality*)

Ketidakberpihakan (*impartiality*) dalam pengelolaan keuangan publik adalah prinsip yang menegaskan pentingnya pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa memihak atau memberikan perlakuan yang tidak adil kepada pihak-pihak tertentu. Prinsip ini menekankan bahwa keputusan-keputusan keuangan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik, pribadi, atau kelompok tertentu. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, ketidakberpihakan berarti bahwa alokasi sumber daya keuangan harus didasarkan pada kriteria-kriteria yang adil dan objektif, tanpa memihak kepada pihak atau sektor tertentu. Hal ini

memastikan bahwa dana publik dialokasikan dengan cara yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara keseluruhan, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan sosial tertentu (Stillman & Stillman, 2005).

Selain itu, prinsip ketidakberpihakan juga mencakup aspek-aspek seperti perlakuan yang sama terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan publik, serta penghindaran konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah harus bertindak secara netral dan adil dalam menjalankan fungsi-fungsi administratifnya, serta memastikan bahwa semua keputusan keuangan diambil berdasarkan pertimbangan yang berdasarkan fakta dan data yang valid. Lebih lanjut, prinsip ketidakberpihakan juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa pegawai-pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan memiliki standar etika yang tinggi dan terhindar dari praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan menjaga keterjangkauan sebagai prinsip dalam pengelolaan keuangan publik, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan akan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan tekanan keuangan yang tidak perlu. Upaya untuk memastikan keterjangkauan tidak hanya penting untuk menjaga keseimbangan fiskal, tetapi juga untuk mempromosikan keadilan sosial dan kemakmuran yang berkelanjutan bagi semua warga negara.

H. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Keberlanjutan (*sustainability*) dalam konteks pengelolaan keuangan publik mengacu pada upaya pemerintah untuk memastikan bahwa keputusan keuangan yang diambil saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan perlindungan

lingkungan, sehingga memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Dalam pengelolaan keuangan publik, prinsip keberlanjutan memengaruhi keputusan penganggaran, alokasi sumber daya, dan implementasi kebijakan ekonomi dan lingkungan. Pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari setiap keputusan keuangan yang diambil, termasuk potensi dampaknya terhadap lingkungan, keberlanjutan fiskal, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini memerlukan keterlibatan yang cermat dalam perencanaan jangka panjang, pemantauan terhadap dampak kebijakan, dan kesiapan untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan.

Prinsip keberlanjutan juga mencakup pengelolaan utang publik dan pengeluaran pemerintah dengan bijaksana, sehingga memastikan bahwa beban keuangan yang dibebankan pada generasi mendatang tetap dapat dikelola dengan baik tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial saat ini. Selain itu, keberlanjutan juga mencakup upaya untuk mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi energi, sehingga menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi dalam jangka panjang (Deslatte, 2022).

Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan publik, pemerintah dapat memastikan bahwa keputusan keuangan yang diambil saat ini tidak hanya menguntungkan generasi saat ini, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan dan hak generasi mendatang. Upaya untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan makmur bagi semua pihak yang terlibat.

BAB 7

Utang Negara

A. Definisi Utang Negara

Utang negara adalah jumlah uang yang dipinjam oleh suatu pemerintahan dari individu, lembaga keuangan, atau pemerintah lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan mendanai kegiatan atau proyek-proyek yang diperlukan untuk pembangunan atau operasional pemerintah. Utang negara dapat digunakan untuk mendanai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya dari suatu negara.

Pemerintah biasanya meminjam uang melalui penerbitan obligasi atau pinjaman dari lembaga keuangan internasional atau pemerintah asing. Utang negara biasanya memiliki jangka waktu tertentu untuk pengembaliannya serta tingkat bunga yang harus dibayar oleh pemerintah sebagai imbalan atas pinjaman tersebut (Hosein, 2016). Dalam beberapa kasus, utang negara dapat menjadi instrumen yang berguna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara jika dikelola dengan baik. Namun, terlalu banyak utang negara atau pengelolaan yang buruk dapat mengakibatkan beban keuangan yang berat bagi pemerintah dan dapat merugikan perekonomian suatu negara.

B. Macam-Macam Utang Negara

Berdasarkan karakteristiknya, utang negara dapat dibagi menjadi beberapa macam, termasuk:

1. *Reproductive Debt* (Utang Produktif)

Reproductive debt, atau utang produktif, merupakan jenis utang negara yang memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis utang lainnya. Salah satu ciri utama dari *reproductive debt* adalah bahwa utang ini dijamin sepenuhnya oleh kekayaan negara. Artinya, pemerintah menjamin pembayaran utang ini dengan seluruh aset atau kekayaan yang dimiliki oleh negara tersebut. Dalam hal ini, jika terjadi kegagalan pembayaran, kreditur dapat mengklaim aset yang dijamin sebagai jaminan untuk memperoleh pembayaran kembali.

Besarnya jumlah *reproductive debt* biasanya sebanding dengan nilai proyek atau investasi yang didanai oleh pinjaman tersebut. Ini berarti bahwa setiap dana yang dipinjam digunakan secara efisien untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang dianggap memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan di masa depan (Halim *et al.*, 2020). Contohnya termasuk pembangunan infrastruktur vital seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, atau proyek-proyek ekonomi lainnya yang diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.

Tujuan utama dari *reproductive debt* adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi. Investasi dalam proyek-proyek ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan di masa depan, yang kemudian dapat digunakan untuk membayar kembali utang serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi negara. Oleh karena itu, pengelolaan *reproductive debt* harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut benar-benar menghasilkan nilai

tambah bagi perekonomian negara dan tidak membebani generasi mendatang dengan utang yang tidak produktif.

2. *Dead Weight Debt* (Utang Tanpa Jaminan Kekayaan)

Dead weight debt, atau utang tanpa jaminan kekayaan negara, adalah jenis utang negara yang tidak didukung oleh jaminan berupa aset atau kekayaan negara. Ini berarti bahwa jika terjadi kegagalan pembayaran, kreditur tidak memiliki aset yang bisa digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembayaran kembali. Utang ini sering kali merupakan hasil dari pengeluaran rutin pemerintah atau untuk menutup defisit anggaran, tanpa adanya pengembalian yang diharapkan di masa depan.

Besarnya *dead weight debt* tidak sebanding dengan nilai proyek atau investasi yang didanai oleh pinjaman tersebut. Hal ini berarti bahwa dana yang dipinjam mungkin tidak digunakan secara efisien untuk mendanai proyek-proyek yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan di masa depan (Nasution, 2015). Sebagai contoh, utang ini mungkin digunakan untuk menutupi pengeluaran operasional pemerintah seperti gaji pegawai, pembayaran bunga utang yang sudah ada sebelumnya, atau subsidi yang tidak produktif secara ekonomi.

Dead weight debt sering kali dianggap sebagai beban bagi perekonomian negara karena tidak memberikan pengembalian yang diharapkan di masa depan. Sebaliknya, hal ini dapat mengakibatkan pemerintah terjebak dalam lingkaran utang yang semakin membesar, yang kemudian membutuhkan lebih banyak pembayaran bunga dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan pengeluaran anggaran dan memastikan bahwa penggunaan utang negara sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan aspek pemerolehan dan kepentingannya, utang negara juga dapat dibedakan menjadi:

1. Pinjaman Sukarela dan Pinjaman Paksa

Pinjaman sukarela adalah jenis utang negara yang diperoleh melalui pasar keuangan dengan cara menerbitkan obligasi atau dengan mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan atau pemerintah lainnya. Proses penerbitan obligasi melibatkan penawaran kepada investor untuk membeli surat hutang negara dengan jangka waktu tertentu dan tingkat bunga yang telah ditetapkan. Pada saat obligasi jatuh tempo, pemerintah membayar kembali pokok utang beserta bunga kepada para pemegang obligasi. Pinjaman ini diperoleh dengan persetujuan penuh dari pemerintah, yang berarti bahwa pemerintah secara sadar mengambil kewajiban untuk membayar kembali utang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Pinjaman paksa adalah jenis utang negara yang diperoleh melalui tekanan atau paksaan dari kreditur. Biasanya, pinjaman paksa terjadi dalam situasi darurat atau saat akses ke pasar keuangan terbatas. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah sering kali terdesak untuk mendapatkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau menutup defisit anggaran. Pinjaman ini dapat diperoleh dari lembaga keuangan internasional, negara lain, atau bahkan dari pihak swasta dengan syarat-syarat yang mungkin kurang menguntungkan bagi pemerintah peminjam. Dalam beberapa kasus, pinjaman paksa dapat menyebabkan pemerintah terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk dibayar kembali, sehingga memperburuk kondisi keuangan negara tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan pinjaman sukarela atau paksa haruslah disertai dengan perencanaan dan manajemen keuangan yang baik oleh pemerintah (Puspa & Ghoni, 2013). Pinjaman ini harus digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak membahayakan stabilitas keuangan negara. Oleh karena itu,

pengelolaan utang negara yang bijaksana sangatlah penting untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkan digunakan secara efektif untuk kepentingan jangka panjang negara dan masyarakatnya.

2. Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri

Pinjaman dalam negeri adalah jenis utang negara yang diperoleh dari penduduk atau lembaga keuangan domestik di dalam negeri. Pemerintah memperoleh pinjaman ini dengan mengeluarkan surat utang atau obligasi kepada masyarakat atau lembaga keuangan dalam negeri. Proses penerbitan surat utang ini sering kali dilakukan melalui lelang atau penawaran umum, di mana masyarakat atau lembaga keuangan dapat membeli surat utang tersebut dengan harapan mendapatkan imbal hasil dalam bentuk bunga atau dividen. Pinjaman dalam negeri dapat menjadi sumber pendanaan penting bagi pemerintah untuk mendukung kebijakan fiskal dan pembangunan dalam negeri. Keuntungan dari pinjaman dalam negeri termasuk keberlanjutan yang lebih tinggi karena pembayaran bunga biasanya dalam mata uang lokal dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar.

Sementara itu, pinjaman luar negeri adalah jenis utang negara yang diperoleh dari lembaga keuangan internasional atau negara lain di luar negeri. Pinjaman ini dapat berupa pinjaman bilateral, yang diperoleh dari satu negara kepada negara lain, atau multilateral, yang diperoleh dari lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), atau lembaga keuangan regional. Pinjaman luar negeri sering kali digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, proyek-proyek strategis, atau untuk menutupi defisit anggaran yang tidak dapat dipenuhi melalui sumber pendanaan dalam negeri. Salah satu keuntungan pinjaman luar negeri adalah bahwa mereka dapat menyediakan akses ke sumber dana yang lebih besar daripada yang tersedia di dalam negeri. Namun, pinjaman luar negeri

juga membawa risiko, seperti risiko valuta asing dan ketergantungan terhadap kondisi pasar internasional.

Suku bunga yang dikenakan pada pinjaman negara dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter, kondisi ekonomi global, risiko kredit, dan hubungan bilateral antara peminjam dan kreditur (Puspita & Yuliari, 2019). Suku bunga tersebut dapat berupa tetap atau mengambang (berubah sesuai dengan perubahan pasar). Suku bunga yang lebih rendah cenderung mengurangi beban pembayaran bunga, sementara suku bunga yang lebih tinggi dapat menambah beban utang negara. Oleh karena itu, manajemen suku bunga sangat penting dalam pengelolaan utang negara.

C. Sumber Pinjaman Negara

Sumber pinjaman negara bervariasi dan dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk individu, lembaga keuangan non-bank, bank-bank umum, dan bank sentral. Berikut penjelasan singkat tentang masing-masing sumber pinjaman tersebut:

1. Para Individu sebagai Kreditur

Individu-individu dapat menjadi kreditur bagi negara dengan membeli obligasi pemerintah atau surat utang lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah. Para individu ini memberikan dana kepada pemerintah dalam bentuk pinjaman dengan harapan mendapatkan imbal hasil berupa bunga dari investasi mereka.

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai Kreditur

Selain bank-bank, lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan investasi juga dapat menjadi kreditur bagi negara. Mereka dapat mengalokasikan sebagian dari portofolio investasi mereka ke dalam obligasi pemerintah atau instrumen keuangan lain yang diterbitkan oleh pemerintah.

3. Bank-Bank Umum sebagai Kreditur

Bank-bank umum, baik domestik maupun internasional, juga merupakan sumber pinjaman penting bagi negara. Pemerintah dapat memperoleh pinjaman dari bank-bank umum dalam bentuk kredit yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan bank. Pinjaman ini dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan atau untuk menutupi defisit anggaran.

4. Bank Sentral sebagai Kreditur

Bank sentral memiliki peran penting dalam menyediakan pinjaman kepada pemerintah. Bank sentral dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah dalam bentuk kredit atau pembelian surat utang pemerintah di pasar sekunder. Pinjaman dari bank sentral sering kali menjadi sumber pendanaan darurat bagi pemerintah dalam situasi keuangan yang sulit.

Setiap sumber pinjaman memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda bagi keuangan negara. Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat struktur pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan negara serta memastikan bahwa penggunaan pinjaman tersebut sejalan dengan kebijakan fiskal yang berkelanjutan.

D. Masalah Utang Negara

Masalah utang negara, terutama utang luar negeri, memang menjadi perhatian dalam konteks kebijakan ekonomi global yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip neoliberalisme. Neoliberalisme adalah pandangan ekonomi yang menekankan pada pasar bebas, deregulasi, privatisasi, dan pembatasan peran pemerintah dalam ekonomi. Dalam konteks utang negara, terdapat beberapa masalah yang muncul terkait dengan pengaruh neoliberalisme global:

1. Ketergantungan pada Institusi Keuangan Internasional

Pemerintahan yang menerapkan kebijakan neoliberal sering kali bergantung pada pinjaman dari institusi keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, atau Bank Pembangunan Asia. Pinjaman ini seringkali disertai dengan kondisi-kondisi yang mengikat, seperti kebijakan struktural yang menuntut deregulasi pasar, pemotongan anggaran publik, dan privatisasi aset publik.

2. Pembangunan Infrastruktur yang Kurang Berkelanjutan

Sebagian besar pinjaman luar negeri digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, terkadang proyek-proyek ini tidak memperhitungkan secara memadai dampak lingkungan dan sosialnya, serta seringkali tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang diharapkan. Hal ini dapat mengakibatkan beban utang yang semakin besar tanpa adanya peningkatan signifikan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3. Risiko Ketergantungan Valuta Asing

Utang luar negeri seringkali dinyatakan dalam mata uang asing, seperti dolar AS atau euro. Hal ini menimbulkan risiko terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang, yang dapat meningkatkan beban utang bagi pemerintah dan berpotensi memicu krisis keuangan jika nilai tukar mata uang negara mengalami penurunan tajam (Wibowo, 2022).

4. Kesenjangan Sosial dan Ketimpangan Ekonomi

Implementasi kebijakan neoliberal sering dikritik karena dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Penekanan pada pasar bebas dan privatisasi dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat yang rentan, serta memperkuat dominasi sektor ekonomi yang dikuasai oleh kelompok-kelompok kaya dan korporasi besar.

Kritik terhadap utang negara dan kebijakan neoliberalisme menekankan pentingnya mengembangkan strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Ini mencakup peningkatan transparansi dalam manajemen utang, pengembangan proyek-proyek yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dalam konteks globalisasi ekonomi.

E. Solusi Mengatasi Utang

Mengatasi utang luar negeri memang menjadi perhatian utama bagi banyak negara, dan terdapat beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengelola utang tersebut. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:

1. Restrukturisasi Utang dengan *Debt Swap*

Salah satu solusi sederhana adalah dengan mengoptimalkan restrukturisasi utang, khususnya melalui skema *debt swap*. Dalam *debt swap*, sebagian utang luar negeri dikonversi menjadi proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan lingkungan, atau sektor-sektor kunci lainnya. Ini tidak hanya mengurangi beban utang negara, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan lingkungan.

2. Pemotongan Utang atau Pembebasan Utang

Upaya untuk meminta pemotongan utang atau pembebasan utang juga merupakan langkah penting dalam mengatasi utang luar negeri. Negosiasi dengan kreditur internasional, seperti lembaga keuangan internasional atau negara-negara kreditur, dapat dilakukan dengan memberikan alasan logis yang didukung oleh fakta-fakta yang kuat. Pemotongan utang atau pembebasan utang dapat memberikan kelonggaran finansial yang signifikan bagi negara yang terlilit utang.

3. Diversifikasi Sumber Pendanaan

Salah satu langkah preventif untuk mengurangi risiko utang adalah dengan mendiversifikasi sumber pendanaan negara. Selain mengandalkan utang luar negeri, pemerintah dapat mencari sumber-sumber pendanaan alternatif, seperti investasi langsung asing, pendapatan pajak domestik yang lebih tinggi, atau pengembangan sektor ekspor yang lebih kuat.

4. Pengelolaan Utang yang Bijaksana

Penting untuk melakukan pengelolaan utang yang bijaksana dan transparan. Pemerintah harus memastikan bahwa utang digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian dan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan proyek-proyek yang didanai oleh utang.

5. Peningkatan Pendapatan dan Efisiensi Pengeluaran

Pemerintah juga perlu meningkatkan pendapatan negara dan efisiensi pengeluaran untuk mengurangi kebergantungan pada utang. Ini dapat dilakukan melalui reformasi pajak yang lebih adil dan efisien, pemberantasan korupsi, pengendalian pengeluaran yang tidak produktif, dan promosi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

F. Beban Utang Negara

Beban dari utang negara dapat menjadi masalah serius dalam pengelolaan keuangan suatu negara. Dua jenis utang yang umumnya menjadi beban bagi pemerintah adalah utang luar negeri dan utang dalam negeri. Berikut adalah beberapa masalah yang terkait dengan pengelolaan utang negara:

1. Utang Luar Negeri

Utang luar negeri merupakan utang yang diperoleh dari lembaga keuangan internasional, negara lain, atau investor asing. Beberapa masalah yang terkait dengan utang luar negeri antara lain:

a. Risiko Valuta Asing

Utang luar negeri seringkali dinyatakan dalam mata uang asing, sehingga fluktuasi nilai tukar mata uang dapat meningkatkan beban utang dalam mata uang lokal.

b. Ketergantungan Eksternal

Ketergantungan pada utang luar negeri dapat mengakibatkan negara menjadi rentan terhadap perubahan kondisi pasar global, termasuk suku bunga dan likuiditas pasar.

c. Kemampuan Membayar Pinjaman

Pemerintah harus mampu membayar kembali utang luar negeri sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Kemampuan ini bergantung pada pendapatan negara, cadangan devisa, dan kebijakan moneter yang tepat.

BAB 8

Kebijakan Keuangan Negara

A. Keuangan Negara

Keuangan negara merujuk pada semua aspek yang terkait dengan pengelolaan keuangan suatu negara, termasuk pendapatan, pengeluaran, serta pengelolaan aset dan utang negara. Ini mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter oleh pemerintah untuk mengatur sumber daya keuangan negara guna mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keuangan negara menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi perekonomian suatu negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menguraikan bahwa pendekatan dalam merumuskan keuangan negara meliputi sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

1. Sisi Subyek

Keuangan negara melibatkan seluruh subyek yang memiliki atau menguasai obyek keuangan negara. Ini mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, serta badan lain yang terkait dengan keuangan negara.

2. Sisi Proses

Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang terkait dengan pengelolaan obyek keuangan negara. Ini dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban atas penggunaan dana.

3. Sisi Tujuan

Keuangan negara mencakup semua kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan pengelolaan obyek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Sektor Publik memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan negara (Adrian Sutedi, 2022).

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan negara.
- d. Pengeluaran negara.
- e. Penerimaan daerah.
- f. Pengeluaran daerah.
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang Negara, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah.
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

B. Kebijakan Keuangan Negara

Kebijakan keuangan negara mengacu pada serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola aspek keuangan suatu negara. Hal ini mencakup berbagai strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, serta pengelolaan aset dan utang negara. Secara umum, kebijakan keuangan negara bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial tertentu, seperti stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan distribusi pendapatan yang adil. Konsep dasar kebijakan keuangan negara melibatkan penentuan sumber daya keuangan, alokasi dana yang efisien, dan pengelolaan risiko keuangan (Reininda *et al.*, 2022).

Ruang lingkup kebijakan keuangan negara mencakup berbagai aspek, mulai dari perumusan kebijakan fiskal dan moneter, hingga pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik serta pengelolaan utang negara. Dengan demikian, kebijakan keuangan negara merupakan instrumen penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mencapai tujuan pembangunan suatu negara.

Tujuan kebijakan keuangan negara adalah sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui pengelolaan keuangan negara. Secara umum, tujuan utama kebijakan keuangan negara adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Stabilitas ekonomi diupayakan dengan mengendalikan inflasi, menjaga keseimbangan pembayaran, serta mengurangi volatilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diwujudkan melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas. Adapun kesejahteraan sosial diperjuangkan dengan cara memastikan akses terhadap layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain tujuan utama tersebut, terdapat pula tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui kebijakan keuangan negara.

Contohnya termasuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Tujuan lainnya mungkin mencakup penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional di tingkat global.

Melalui berbagai tujuan tersebut, kebijakan keuangan negara diharapkan dapat mengarahkan penggunaan sumber daya keuangan secara efisien dan efektif, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

C. Instrumen Kebijakan Keuangan Negara

Instrumen kebijakan keuangan negara merujuk kepada berbagai alat atau mekanisme yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan tertentu. Instrumen ini meliputi beragam kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi yang digunakan untuk mengelola pendapatan, pengeluaran, serta alokasi sumber daya keuangan negara (Amtiran & Molidya, 2020).

Salah satu instrumen utama adalah kebijakan pajak, yang melibatkan penetapan tarif pajak untuk berbagai jenis pendapatan, barang, dan jasa. Pajak digunakan sebagai sumber utama pendapatan negara dan dapat digunakan untuk mengatur distribusi pendapatan, merangsang investasi, atau mengendalikan konsumsi tertentu.

Selain pajak, subsidi juga merupakan instrumen penting dalam kebijakan keuangan negara. Subsidi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti subsidi bahan bakar, subsidi harga, atau subsidi untuk industri tertentu. Subsidi digunakan untuk mendukung sektor-sektor tertentu dalam perekonomian, meningkatkan daya saing, atau memberikan perlindungan kepada konsumen.

Regulasi fiskal lainnya mencakup berbagai kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah, termasuk pembentukan anggaran, alokasi dana untuk berbagai program dan proyek, serta

pengelolaan utang negara. Regulasi ini juga mencakup kebijakan yang mengatur sektor keuangan, termasuk perbankan dan pasar modal (Heliany, 2021).

Contoh penerapan instrumen kebijakan dalam keuangan negara meliputi penyesuaian tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan negara, pemberian subsidi kepada petani untuk meningkatkan produksi pangan, dan pembentukan anggaran belanja untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi umum.

D. Proses Pembuatan Kebijakan Keuangan Negara

Proses pembuatan kebijakan keuangan negara melibatkan beberapa tahapan yang penting, dimulai dari perumusan hingga evaluasi. Tahapan-tahapan ini mencakup:

1. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan menjadi langkah awal yang krusial dalam proses pembuatan kebijakan keuangan negara. Pada tahap ini, pemerintah serta lembaga terkait melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada serta merumuskan solusi-solusi yang tepat. Pendekatan yang cermat dalam tahap perumusan ini memungkinkan untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh negara. Dengan demikian, tahap perumusan kebijakan memiliki peran sentral dalam menetapkan dasar bagi pembuatan kebijakan keuangan negara yang efektif dan berkelanjutan.

2. Penyusunan Rancangan Kebijakan

Setelah tahap perumusan, langkah berikutnya dalam proses pembuatan kebijakan keuangan negara adalah penyusunan rancangan kebijakan. Pada tahap ini, rancangan kebijakan keuangan negara disusun dengan menguraikan secara rinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ini mencakup alokasi dana yang tepat, pemilihan instrumen

kebijakan yang sesuai, serta penentuan sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan tersebut. Dengan menyusun rancangan kebijakan secara teliti, diharapkan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pengambilan Keputusan

Pada tahap pengambilan keputusan, rancangan kebijakan keuangan negara dievaluasi dan disetujui oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang, seperti kabinet atau lembaga legislatif, sebelum diimplementasikan. Proses ini melibatkan diskusi intensif, negosiasi, dan kadang-kadang kompromi antara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan telah dipertimbangkan dengan cermat, bahwa berbagai sudut pandang telah dipertimbangkan, dan bahwa kebijakan tersebut memiliki dukungan yang kuat dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengambilan keputusan ini menjadi langkah kunci dalam menentukan arah dan implementasi kebijakan keuangan negara.

4. Implementasi Kebijakan

Setelah mendapatkan persetujuan, kebijakan keuangan negara kemudian diimplementasikan oleh berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam proses tersebut. Tahap implementasi ini melibatkan pengalokasian sumber daya yang diperlukan, pelaksanaan program-program yang telah dirancang, serta penerapan instrumen kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini memerlukan kerjasama antarinstansi pemerintah dan keterlibatan aktif dari berbagai pelaku yang terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan dari tahap implementasi ini adalah untuk mewujudkan kebijakan keuangan negara menjadi tindakan konkret yang

dapat memberikan dampak nyata dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan keuangan negara yang mengarah pada perubahan sosial dan ekonomi yang diinginkan.

5. Evaluasi dan Pengawasan

Tahap evaluasi dan pengawasan merupakan bagian penting dari proses kebijakan keuangan negara. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan, termasuk apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dan untuk menilai dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Sementara itu, proses pengawasan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi perubahan yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kedua tahap ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan agar kebijakan keuangan negara dapat mencapai hasil yang diinginkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Beberapa faktor yang memengaruhi proses pembuatan kebijakan keuangan negara meliputi:

- a. Kondisi ekonomi dan politik saat itu, termasuk perubahan dalam kebijakan global.
- b. Tekanan dari masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan, dan lembaga-lembaga ekonomi.
- c. Ketersediaan data dan analisis yang relevan untuk mendukung perumusan kebijakan.
- d. Konsistensi dengan hukum dan regulasi yang ada.
- e. Ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan untuk melaksanakan kebijakan.

Dengan memperhatikan tahapan-tahapan tersebut dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi, proses pembuatan kebijakan keuangan negara dapat berjalan dengan

lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat.

E. Peran Berbagai Pihak dalam Kebijakan

Peran berbagai pihak dalam kebijakan keuangan negara adalah penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan dari proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan tersebut. Peran utama yang dimainkan oleh berbagai pihak meliputi:

1. Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat bertanggung jawab atas perumusan kebijakan keuangan negara secara keseluruhan, termasuk penetapan kebijakan fiskal, alokasi anggaran, dan pengelolaan utang negara. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menyesuaikan kebijakan keuangan nasional dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran daerah, termasuk alokasi dana untuk pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal (Rohman & Wulan, 2022).

2. Lembaga Keuangan dan Ekonomi Lainnya

Bank Sentral memiliki peran kunci dalam mengatur kebijakan moneter dan mengawasi stabilitas sistem keuangan negara. Mereka bertanggung jawab atas pengendalian inflasi, pengaturan suku bunga, serta menjaga stabilitas nilai mata uang. Lembaga keuangan lainnya, seperti Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), juga ikut berperan dalam pengelolaan keuangan negara, seperti pemungutan pajak, pengelolaan utang, dan pengawasan penggunaan anggaran publik. Organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia juga bisa memberikan dukungan teknis dan keuangan bagi kebijakan keuangan negara.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat penting dalam memastikan bahwa kebijakan keuangan negara mencerminkan kebutuhan dan aspirasi dari berbagai segmen masyarakat. Masyarakat bisa memberikan masukan, umpan balik, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Organisasi masyarakat sipil, kelompok advokasi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga berperan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan keuangan negara.

Dengan keterlibatan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak tersebut, diharapkan kebijakan keuangan negara dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara efektif, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih baik.

F. Evaluasi Kebijakan Keuangan Negara

Untuk mengevaluasi kebijakan keuangan negara di Indonesia, berikut adalah beberapa langkah dan metode yang dapat digunakan:

1. Analisis Kinerja Keuangan

Evaluasi kinerja keuangan negara dapat dilakukan dengan menganalisis pendapatan dan pengeluaran pemerintah serta posisi keuangan negara secara keseluruhan. Melakukan perbandingan antara target dan realisasi pendapatan serta pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana Publik

Mengukur seberapa efisien dan efektif penggunaan dana publik dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Membandingkan output dan outcome dari program-program yang didanai oleh APBN dengan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Analisis Kebijakan Fiskal

Mengevaluasi dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas keuangan negara. Mengukur efektivitas kebijakan pajak, subsidi, dan insentif fiskal lainnya dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

4. Analisis Hutang Publik

Menilai keberlanjutan utang publik dan kemampuan pemerintah untuk membayar bunga dan pokok utang. Menganalisis struktur utang, tingkat bunga, dan profil jatuh tempo utang negara.

5. Survei dan Penelitian Opini Publik

Melakukan survei dan penelitian untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang kebijakan keuangan negara. Menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara dan persepsi terhadap kinerja pemerintah dalam hal ini.

6. Pengawasan dan Akuntabilitas

Memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Memeriksa laporan keuangan pemerintah secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (Sianipar & Ardini, 2023).

7. Evaluasi terhadap Kebijakan dan Program Spesifik

Melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan program spesifik yang telah diimplementasikan, termasuk program pembangunan infrastruktur, subsidi, dan program kesejahteraan sosial. Mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan dampak dari setiap kebijakan atau program tersebut.

G. Tantangan dalam Kebijakan Keuangan Negara

Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan isu-isu dalam merancang dan melaksanakan kebijakan keuangan negara. Beberapa di antaranya adalah:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan keuangan negara adalah keterbatasan sumber daya keuangan yang tersedia. Keterbatasan ini menghambat kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang direncanakan. Dengan keterbatasan ini, pemerintah harus melakukan alokasi dana secara bijaksana dan strategis untuk memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang paling mendesak serta memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya keuangan dengan efisien dan efektif menjadi kunci dalam menghadapi keterbatasan ini dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan (Undang-Undang Indonesia, 2020).

2. Pendapatan dan Pengeluaran yang Tidak Seimbang

Kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah menjadi masalah serius. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, terutama dari sektor pajak, namun masih ada kesenjangan yang signifikan antara pendapatan dan pengeluaran, yang mengakibatkan defisit anggaran yang terus meningkat.

3. Hutang Publik

Masalah hutang publik menjadi perhatian penting. Meskipun sebagian besar hutang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi, namun masih ada risiko terkait keberlanjutan utang dan kemampuan untuk membayar kembali utang.

4. Subsidi

Subsidi energi dan barang-barang pokok menjadi beban besar bagi anggaran negara. Isu subsidi sering kali berkaitan dengan efisiensi penggunaan anggaran publik serta keadilan sosial, di mana subsidi harus diarahkan kepada mereka yang membutuhkannya.

5. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi antara wilayah dan kelompok masyarakat menjadi isu penting. Pembangunan infrastruktur dan distribusi dana publik harus diseimbangkan agar tidak semakin memperdalam ketimpangan ekonomi.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi perhatian. Perlunya memastikan bahwa dana publik dialokasikan secara transparan, efisien, dan efektif, serta dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat.

7. Pola Konsumsi dan Investasi

Perubahan pola konsumsi dan investasi di tengah dinamika ekonomi global juga menjadi tantangan. Pemerintah perlu menghadapi tantangan ini dengan meningkatkan daya saing ekonomi, mengoptimalkan investasi, dan mengurangi ketergantungan pada impor.

8. Ketahanan Ekonomi dan Keuangan Global

Tantangan dari ekonomi global, seperti fluktuasi harga komoditas dan kondisi ekonomi global yang tidak pasti, juga mempengaruhi kebijakan keuangan negara. Indonesia perlu memperkuat ketahanan ekonomi dan keuangan dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang tidak stabil. Pada saat covid-19 Indonesia mengeluarkan tentang kebijakan keuangan untuk mengatasi stabilitas sistem keuangan indonesia. Dimana pada saat itu keuangan global banyak resesi

dikarenakan covid-19. Ketahanan ekonomi harus direspon cepat oleh pemerintah agar bisa segera mengatasi berbagai masalah yang tidak menentu (Undang-Undang Indonesia, 2020).

Dengan mengatasi berbagai tantangan ini dan mengelola isu-isu kontemporer dengan bijaksana, pemerintah Indonesia dapat merancang kebijakan keuangan negara yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Menjaga stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan keuangan sektor publik memainkan peran yang sangat penting. Artikel ini telah mengulas tentang pentingnya pengelolaan APBN dan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Dalam konteks pengelolaan APBN, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan adalah prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi. Transparansi dalam pengelolaan dana publik memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana tersebut, sementara akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangannya. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan membantu menjamin bahwa pengelolaan APBN dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dalam menjaga prinsip-prinsip tersebut, peran BPK menjadi sangat penting. BPK bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan APBN secara independen, memberikan rekomendasi perbaikan, dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik. Dengan demikian, BPK tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendorong perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik. Kolaborasi antara BPK, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan sektor publik menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan APBN, diharapkan bahwa pengelolaan keuangan sektor publik dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, S. H. (2022). Hukum Keuangan Negara. *Sinar Grafika*.
- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Solusi*, 18(3), 407–418. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.311>
- Agustina, I. F. (2024). *Buku Ajar Pengantar Sistem Ekonomi Indonesia*. Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/2024/978-623-464-086-1>
- Akbar, F., & Syafina, L. (2021). Analysis of the Achievment of Non-Tax State Revenues (PNBP) at the Main Port Office of Belawan. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 193–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.35145/bilancia.v7i1.2056>
- Akhorshaideh, A. H. O., & Alshoubaki, W. (2019). Public Budgeting in Jordan: Governance Structure and Budget Preparation Process. *ERN: Budget; Budget Systems (Topic)*, 8(2), 270–278. <https://doi.org/10.25255/JSS.2019.8.2.270.278>
- Amtiran, P. Y., & Molidya, A. (2020). Pengelolaan keuangan negara. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), 203–214.
- Aoujil, Z., & Hanine, M. (2024). *A Review on Artificial Intelligence and Behavioral Macroeconomics* (pp. 332–341). https://doi.org/10.1007/978-3-031-53824-7_30
- Auerbach, A. J., & Smetters, K. A. (2017). *The economics of tax policy*. Oxford University Press.

- Bahl, R. W., & Linn, J. F. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*. Published for the World Bank.
- Ball, R., Heafey, M., & King, D. (2002). The Private Finance Initiative and Public Sector Finance. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 20(1), 57–74. <https://doi.org/10.1068/C0045>
- Beschel, R. P., Ahern, M. E., & Bank, W. (2012). *Public Financial Management Reform in the Middle East and North Africa: An Overview of Regional Experience*. World Bank.
- Bîrlă, D. C. O., Voicu, C.-E., & Kaur, K. (2023). "Improving public sector performance: the power of implementing corporate governance ". *Journal of Financial Studies*, 8(14), 98–109. <https://doi.org/10.55654/JFS.2023.8.14.7>
- Biswan, A. T., & Kusumo, D. P. P. (2021). Penajaman Peran Penganggaran Sektor Publik Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(1), 58–77. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.341>
- Boadway, R. W., & Shah, A. (2007). *Intergovernmental Fiscal Transfers: Principles and Practice*. World Bank.
- Calabrò, A. (2011). *Governance Structures and Mechanisms in Public Service Organizations: Theories, Evidence and Future Directions*. Physica-Verlag HD.
- Cnossen, S., & Sinn, H. W. (2003). *Public Finance and Public Policy in the New Century*. Pearson Education.
- Deslatte, A. (2022). *Organizing and Institutionalizing Local Sustainability: A Design Approach*. Cambridge University Press.
- Dhamara, R., & Fauzi, A. (2023). EFEKTIVITAS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEMENTERIAN LEMBAGA. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 104–110. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.666>

- Ditisrama, T., Sinaulan, R. L., & Ismail. (2022). Fungsi Budgetary dan Regulatory Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 4(6), 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i6.1897>
- Djankov, S., Ganser, T., McLiesh, C., Ramalho, R., & Shleifer, A. (2010). The effect of corporate taxes on investment and entrepreneurship. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(3), 31–64.
- Ekperiware, M. C., Akinrinola, O. O., Ademiju, A., Ejima, S. I., & Ogbogbo, O. G. (2022). Effects of Public Debt on Economic Growth in Nigeria. *Caleb Journal of Social and Management Science*, 07(01), 30–53. <https://doi.org/10.26772/CJSMS2022070102>
- Erude, S. U., Onavwie, F. O., & Okereka, O. P. (2023). THE ROLE OF THE INFORMAL SECTOR IN UNEMPLOYMENT REDUCTION IN NIGERIA. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, 28, 95–107. <https://doi.org/10.47743/JOPAFL-2023-28-09>
- Fakhruzy, A. (2020). Peranan Hukum Pajak Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara. *Jurnal Transparansi Hukum*, 9(2), 84–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i2.932>
- Fisnik, M., & Berisha, A. (2021). The Effect of Public Debt on Private Consumption: The Case of Countries in Transition. *Journal of Corporate Governance Insurance and Risk Management*, 8(2), 25–35. <https://doi.org/10.51410/JCGIRM.8.2.3>
- Gabow, S. M. (2017). *Role of Strategic Management Practices in Organizational Performance in the Public Sector in Kenya: Case of Kenya Rural Roads Authority*.
- Gruber, J. (2005). *Public finance and public policy*. Macmillan.

- Gusarova, L. V. (2021). FINANCIAL MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR. *EKONOMIKA I UPRAVLENIE: PROBLEMY, RESHENIYA*, 1(1), 71–76. <https://doi.org/10.36871/EK.UP.P.R.2021.01.01.011>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *PERPAJAKAN Konsep Aplikasi Contoh dan Studi Kasus* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Hallerberg, M., & Hagen, Jürgen. (1997). *Electoral Institutions, Cabinet Negotiations, and Budget Deficits within the European Union*. .
- Hayek, F. A. (1978). *Law, Legislation and Liberty: A New Statement of the Liberal Principles of Justice and Political Economy* (Issue v. 3). University of Chicago Press.
- Heliany, I. (2021). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. *In Prosiding Seminar Stiami*, 8(1), 15–21.
- Hepworth, N. (2023). *Public Financial Management and Internal Control: The Importance of Managerial Capability for Successful Reform in Developing and Transition Economies*. Springer International Publishing.
- Hosein, Z. A. (2016). Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3), 503–528. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art8>
- Howard, M. (2001). *Public Sector Economics for Developing Countries*. University of the West Indies Press.
- Khan, A., & Hildreth, W. B. (2002). *Budget Theory in The Public Sector*. Quorum Books.
- Maksimović, S., Lunjić, A., & Parojčić, D. (2020). Financial management and control: A new management concept in the context of the Serbian public sector. *Megatrend Revija*, 17(3), 47–64. <https://doi.org/10.5937/MEGREV2003047M>
- Malyshko, V. (2021). Current realities and trends in the functioning of public finance in Ukraine. *University Economic Bulletin*, 50, 187–193. <https://doi.org/10.31470/2306-546X-2021-50-187-193>

- Mankiw, N. G. (2020). *Principles Of Economics*. Cengage Learning. Boston, MA, USA.
- Martinez, L. (2019). Sources of Revenue and Government Performance: Evidence from Colombia. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3273001>
- Mitchell, D. J. (2005). *The impact of government spending on economic growth*.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed). McGraw-Hill Book Co.
- Nasution. (2015). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *Jurnal Akun Stie*, 95–112.
- Nicolaus Tideman, T., & Plassmann, F. (2015). Sources of Public Revenue that Make Nations Richer. *ERN: Other Macroeconomics: Employment*, 35(2), 197–214. <https://doi.org/10.1111/ECAF.12116>
- Ningsih, E. K., Novianty, D. E., & Naruliza, E. (2021). Analisis Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 136–141. <https://doi.org/10.36982/jiegmk.v12i2.1408>
- Puspa, P. C., & Ghoni, M. A. (2013). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 52.
- Puspita, N. V., & Yuliari, K. (2019). Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham, Abnormal Return Dan Risiko Sistematis Saham Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei 2016-2018). *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4(1), 95. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.335>
- Rahmani, A., Behbahaninia, P. S., Parsaei, M., & Mahmoudkhani, M. (2023). A public sector financial management maturity model for developing countries: the case of Iran. *International Review of Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.1177/00208523231195707>

- Reininda, V., Maulana, M. I. , & Putri, L. D. (2022). *Konstitusionalitas Kebijakan Keuangan Negara*.
- Rohman, A. , & Wulan, D. R. (2022). Peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan moneter terhadap kesetabilan keuangan negara. *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*, 9(1), 19–22.
- Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1645>
- Santoso, A. B. (2021). Penggunaan Informasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 9(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v9i4.70469>
- Sianipar, G. A. E., & Ardini, L. (2023). Pemeriksaan Keuangan Negara pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan, Dan Investasi)*, 4(1), 34–42.
- Sinaga, N. A. (2018). Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(1).
- Stillman, R. J., & Stillman, R. J. (2005). *Public Administration: Concepts and Cases*. Houghton Mifflin.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Binaniaga*, 8(02), 155. <https://doi.org/10.33062/jib.v8i02.328>
- Tsania Qotrunnada, & Diamonalisa Sofianty. (2023). Pengaruh Penerapan E-Billing dan Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–48. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1780>
- Tsvirko, S. (2023). Public debt from the viewpoint of national security and sovereignty. *Journal of Digital Art & Humanities*, 4(2), 37–51. https://doi.org/10.33847/2712-8149.4.2_5

- Ulbrich, H. (2013). *Public Finance in Theory and Practice Second edition*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203817018>
- Undang-Undang Indonesia. (2020). *Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Wibowo, A. (2019). PROMOTING DEVELOPMENT PROGRAM EFFECTIVENESS: THE EXPECTED ROLE OF PUBLIC SECTOR AUDIT IN STATE FINANCE MANAGEMENT. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 103–123.
<https://doi.org/10.28986/JTAKEN.V5I2.358>
- Wibowo, A. (2022). Transformasi Ekonomi Digital. In *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Winardi, S., Marsongko, Y., & Marzuki, A. F. (2021). Implementasi Sistem Informasi Program Kerja Dan Anggaran Fakultas XYZ. *Respati*, 16(3), 69.
<https://doi.org/10.35842/jtir.v16i3.420>
- Wojewski, P. (2020). Administrative agreement as a Legal Form of Administration in the Light of the System of Implementation of the Structural Funds and the Cohesion Fund by Public Finance Sector Entities. *Białostockie Studia Prawnicze*, 25(1), 141–160.
<https://doi.org/10.15290/BSP.2020.25.01.11>

Tentang Penulis



Dr. M. Zahari, S.E., M.Si.

Dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari
(UNBARI) Jambi

M. Zahari. MS. Lahir di Desa Pulau Buayo Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 7 November 1966 merupakan anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan H. M. Sahar dan Hj. Siti Aminah. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi tahun 1992, Magister Sains (M.Si) Ilmu Ekonomi di Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2001, dan Doktor Ekonomi (Dr) di Program Pascasarjana Universitas Jambi tahun 2019.

Profesi penulis adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari (UNBARI) Jambi sejak tahun 1994. Mengampu mata kuliah Ekonomi Publik, Teori Ekonomi Makro, Ekonomi Moneter, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Metodologi Penelitian, Riset SDM, Perencanaan dan Pengembangan SDM, Manajemen Tim dan Evaluasi Kinerja, Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Disamping itu, penulis aktif sebagai tenaga peneliti pada Pusat Studi Ekonomi dan Lingkungan

Universitas Batanghari Jambi, dan Pusat Kajian Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi, serta sebagai Tim Editor/Reviewer pada Jurnal Paradigma Ekonomika Universitas Jambi, Jurnal Khazanah Intelektual Balitbangda Provinsi Jambi, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Manajemen (Jakman) Penerbit Goodwood, Jurnal Perbankan Syariah (JPS) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, dan MAMEN (Jurnal Manajemen) Yayasan Literasi Sains Indonesia. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting (DIJEFA), Greenation International Journal of Economics and Accounting (GIJEA), Siber Journal of Advanced Multidisciplinary (SJAM).

Buku yang telah diterbitkan; Green Ekonomi (2017), Metodologi Penelitian Kuantitatif (2020), Manajemen Sumber Daya Manusia (2021), Metodologi Penelitian Sosial (2021). Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Kelola Menuju Pemerintahan yang Baik (2022), Teori Ekonomi Makro (2022), Manajemen SDM, Strategi Organisasi Bisnis Modern (2022), dan Ekonomi Moneter (2023).

Jabatan Struktural yang telah diemban penulis adalah: Ketua Program S2 Magister Manajemen Universitas Batanghari (2018-2022), sebelumnya Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari (2014-2018). Ketua Senat Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari (2014-2018); Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari (2006-2014); Sekretaris Program S2 Magister Manajemen Universitas Batanghari (2008-2010); dan Kasubbag Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari (1996-2000).

Keikutsertaan penulis dalam Organisasi sosial kemasyarakatan/publik, di antaranya: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (2003-2008), Dewan Pengupahan Provinsi Jambi (2008-2018), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ahli Dosen Republik Indonesia (ADRI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI), Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi (DKLPT), dan Ketua Asosiasi Dosen Metodologi Penelitian Indonesia (IRMLA) PW Jambi (2022-2027).



Dr. Paul Usmany, S.E., M.Si., AK.

Dosen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura

Penulis lahir di Ternate tanggal 7 Mei 1968. Penulis adalah dosen pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura tahun 1993, dan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada tahun 2000, kemudian melanjutkan S2 pada program Studi Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2002. Setelah menyelesaikan pendidikan S2 tahun 2004, penulis selanjutnya mengikuti pendidikan S3 tahun 2008 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, dan selesai pada tahun 2013.

Penulis menekuni bidang penelitian akuntansi sektor publik, terutama pada pengelolaan keuangan daerah, serta penelitian pada pendidikan akuntansi, perpajakan, maupun tata kelola pemerintahan.



Andi Asari, S.I.P., S.Kom., M.A., P.hD (C).

Dosen Universitas Negeri Malang
Kandidat Doktor S3 Information Science UiTM Malaysia

Andi Asari, yang mempunyai nama lengkap Andi Muhammad Asari sebagai nama pemberian orang tua, dan memiliki nama pena atau panggilan akrab Anas adalah dosen di Universitas Negeri Malang yang saat ini sedang melanjutkan studi doctoral (S3) di jurusan Information Management UiTM Malaysia. Lahir di desa Brongkal kabupaten Malang, semasa di Malang pernah mengenyam pendidikan di MI Azharul Ulum 02 Brongkal, kemudian lanjut di MTsN Malang 3 Sepanjang gondanglegi, dan lanjut di SMK Turen Malang. Kemudian melanjutkan belajar di perguruan tinggi di beberapa perguruan tinggi dikota Malang dan kemudian pindah ke kota pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sekarang domisili di Malang Jawa Timur. Penulis merupakan alumni dari Magister Kajian Budaya dan Media sekolah pasca sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga alumni dari jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mulai tahun 2015 sampai sekarang penulis aktif mengajar sebagai dosen tetap di Universitas Negeri Malang dan di beberapa lembaga pendidikan pondok pesantren di Malang Raya. Disamping kesibukan di dunia akademis penulis juga memiliki kegiatan pengabdian di masyarakat dengan mengisi seminar, workshop, dll.

Riwayat Mengajar:

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_dosen/RjEyRkFENzYtMEYxOS00QjE3LThFMzQtNTY1RkYwOTA3MzM1

Riwayat Publikasi Artikel:

<https://sinta.kemdikbud.go.id/authors?q=andi+asari>

Riwayat Penerbitan Buku:

https://www.google.com/search?q=andi+asari&tbm=bks&ei=WEHEYpa1OdWh4t4PkI2jqAw&ved=0ahUKEwiWwf3w8eH4AhXVknGfHZDGCUMUQ4dUDCAg&oq=andi+asari&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LWJvb2t2EAxQAFgAYABoAHAAeACAAQCIQAQCSAQCYAQA&sclient=gws-wiz-books

Riwayat Penelitian dan Pengabdian:

<https://pakar.um.ac.id/Data/Peneliti/view/eyJpdil6lkt5bFNGRVQyOURKVVWdkNHfjUzVjR0E9PSIsInZhbHVlIjojUjhJNGtKUDA4OVIxQ0Zkr3hRRUR2RGZWbU9HMLc2dGMvRHVSOG4zSW93QT0iLCJtYWMiOiI4ZGYxNTlmYjYwZTZmOWNmYjk4YTRiMGY1OGJiNTZkNDIwNTc5ZThkY2YxMzk3OWU0MWRkMjk1MWRjZjc3YWWRkIn0=>

Email : andi.asari.fs@um.ac.id

Scopus ID : 57213605546

Google scholar :

<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=YVa5GeIAAAAJ>

Researchgate :

<https://www.researchgate.net/profile/Andi-Asari/research>

Youtube :

<https://youtube.com/channel/UCnNHvnNWspDB1pRQmBoI6ZQ>

<https://youtube.com/channel/UCJBO0b8pPXR86HuLrv7tn-Q>

Facebook : <https://www.facebook.com/andiasari.official/>

Instagram : andiasari.official



Dr. La Didi, S.I.P., MAP.

Dosen Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Penulis lahir di Buton tanggal 27 Desember 1978. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado. Melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Manado. Penulis menyelesaikan studi S3 pada program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis menekuni bidang penelitian tata kelola sektor publik dan pengabdian masyarakat bidang pemberdayaan dan ekowisata.